

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR LESTARI BALI
TAHUN 2023**



**JALAN TEUKU UMAR NO 110 DENPASAR
TELEPON: 0361246706**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam menjalankan kegiatan operasional, PT BPR Lestari Bali menerapkan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (self assessment) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola), Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola), dan Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola). Hasil akhir penilaian sendiri (self assessment) tahun 2023 berupa nilai komposit dengan nilai 2 (dua) dengan peringkat Baik.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

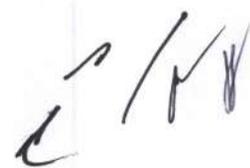
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Albertus Gunawan
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>Menyelenggarakan kegiatan perusahaan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan Perusahaan.</p> <p>Mengorganisasikan seluruh elemen organisasi dengan seefisien mungkin.</p> <p>Mengoptimalkan seluruh resources yang ada sehingga memberikan keuntungan semaksimal mungkin pada organisasi perusahaan.</p> <p>Mengusahakan sebaik-baiknya pencapaian target-target/ rencana kerja perusahaan.</p> <p>Melakukan penjualan produk funding & lending termasuk distribusi target per produk, rencana jumlah sales serta chanel yang digunakan.</p> <p>Melakukan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap kinerja penjualan setiap produk.</p> <p>Melakukan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap kualitas kredit yang diberikan.</p> <p>Melakukan analisa serta evaluasi kinerja karyawan</p>		
2.	Nama	: Made Tutik Sri Andayani
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>Membantu Direktur Utama menyelenggarakan kegiatan bisnis dan perusahaan.</p> <p>Mengorganisasikan seluruh elemen organisasi dengan seefisien mungkin.</p> <p>Mengoptimalkan seluruh resources yang ada sehingga memberikan keuntungan semaksimal mungkin pada organisasi perusahaan.</p> <p>Mengusahakan sebaik-baiknya pencapaian target-target/rencana kerja perusahaan.</p> <p>Melakukan penjualan produk funding & lending termasuk distribusi target per produk rencana jumlah sales serta chanel yang digunakan.</p> <p>Melakukan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap kinerja penjualan setiap produk.</p> <p>Melakukan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap kualitas kredit yang diberikan.</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan dengan sebaik – baiknya demi tercapainya tujuan perusahaan.</p> <p>Melakukan analisa serta evaluasi kinerja karyawan.</p>		
3.	Nama	: Putu Yeni Jinarti
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>Membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan kegiatan Tata Kelola Perusahaan</p> <p>Memetakan Langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Lestari telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan lain dalam melaksanakan prinsip kehati hatian</p>		

<p>Memantau, menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangan</p> <p>Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK</p> <p>Wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan/ keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan perundangan lainnya</p> <p>Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SDM dalam perencanaan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan termasuk pengembangan kualitas yang berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang berlaku</p> <p>Mengoptimalkan seluruh resources yang ada sehingga memberikan keuntungan semaksimal mungkin pada organisasi perusahaan.</p> <p>Mengusahakan sebaik-baiknya pencapaian target-target / rencana kerja perusahaan</p> <p>Melakukan analisa serta evaluasi kinerja karyawan.</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p>
<p>Melaksanakan rekomendasi dewan komisaris untuk untuk melakukan monitoring secara ketat terhadap debitur- debitur yang direstrukturisasi untuk mengantisipasi dicabutnya kebijakan relaksasi terhadap debitur yang terdampak Covid-19 pada akhir Maret 2024</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p>
<p>Melaksanakan rekomendasi dewan komisaris untuk melakukan penjualan AYDA dengan target Rp 200 mliyar pada tahun 2024</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Alex Purnadi Chandra
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Mengawasi jalannya Perseroan secara Operasional</p> <p>Mengevaluasi besar-besaran target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dengan realisasi.</p>	
2.	Nama	: Antonius Padua Saptono Soerjo
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen</p> <p>Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi</p> <p>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi</p> <p>Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Strategis BPR</p> <p>Mengevaluasi secara besar-besaran target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dengan realisasi</p>	
Rekomendasi Kepada Direksi :		
<p>1. Melakukan monitoring secara ketat terhadap debitur-debitur yang direstrukturisasi untuk mengantisipasi dicabutnya kebijakan relaksasi terhadap debitur yang terdampak Covid-19 pada akhir Maret 2024</p> <p>2. Melakukan penjualan AYDA dengan target Rp 200 mliyar pada tahun 2024</p>		
Penjelasan Lebih Lanjut :		

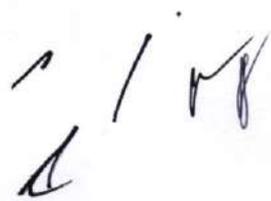


Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dan atas tindak lanjut hasil audit. c. Memberikan rekomendasi terhadap pemantauan dan evaluasi kerja SKAI kepada Dewan Komisaris, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> i. Pelaksanaan tugas SKAI. ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit. iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. d. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi: <ul style="list-style-type: none"> i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. ii. Prestasi kerja individual. iii. Kewajaran dengan peer grup. iv. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR. v. Kebijakan pengelolaan SDM, penilaian kinerja dan stuktur remunerasi. vi. Sistem promosi, demosi, mutasi, dan revitalisasi untuk karyawan b. Mengeluarkan rekomendasi berupa laporan tertulis yang ditulis oleh Sekretaris Komite.
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi masing-masing diatur pada SK No. 070/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Perubahan Pembentukan Komite Audit, SK No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko, dan SK No. 069/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi.
 Selama tahun 2023, seluruh tugas dan tanggung jawab Komite telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Alex Purnadi Chandra	Keahlian di bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	Anggota (Komite Remunerasi)	Tidak
2.	Antonius Padua Saptono Soerjo	Keahlian di bidang manajemen risiko	Ketua (Komite Audit) Ketua (Komite Pemantau Resiko)	Tidak
3.	Shelley Suseno	Keahlian di bidang akuntansi dan/ atau keuangan dan perbankan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
4.	Endah Mirasanty	Keahlian di bidang akuntansi dan/ atau keuangan dan perbankan	Anggota (Komite Audit) Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
5.	Made Wenten Budiada	Keahlian di bidang perbankan dan manajemen risiko	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
6.	Trisno Herman Dinijanto	Keahlian di bidang perbankan dan manajemen risiko	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Seluruh Anggota Komite memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi dan/ atau pengalaman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan	
	Realisasi	:	Program kerja Komite Audit pada tahun 2023 telah direalisasikan seluruhnya.	
	Jumlah Rapat	:	4	



2. Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	Penerapan manajemen risiko Perusahaan
	Realisasi	:	Program kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2023 telah direalisasikan seluruhnya.
	Jumlah Rapat	:	4
3. Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	Melakukan identifikasi, evaluasi, dan menominasikan karyawan serta menentukan besaran kompensasi atau gaji karyawan
	Realisasi	:	Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2023 telah direalisasikan seluruhnya.
	Jumlah Rapat	:	3
Penjelasan Lebih Lanjut			
nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Albertus Gunawan	Rp0	0%
2.	Made Tutik Sri Andayani	Rp0	0%
3.	Putu Yeni Jinarti	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak terdapat Anggota Direksi dengan kepemilikan saham di BPR Lestari Bali.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Albertus Gunawan	-	-	0%
2.	Made Tutik Sri Andayani	-	-	0%
3.	Putu Yeni Jinarti	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat anggota direksi yang memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Albertus Gunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Made Tutik Sri Andayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Putu Yeni Jinarti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi BPR Lestari Bali tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Albertus Gunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Made Tutik Sri Andayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Putu Yeni Jinarti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi BPR Lestari Bali tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Alex Purnadi Chandra	Rp11.800.000.000	2.36%
2.	Antonius Padua Saptono Soerjo	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Berdasarkan data di atas, Komisaris Utama Bapak Alex Purnadi Chandra memiliki saham pada BPR Lestari Bali sebesar 11.800.000.000 (2.36%)			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Alex Purnadi Chandra	-	PT BPR Lestari Jakarta	10%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Alex Purnadi Chandra memiliki saham pada satu perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Alex Purnadi Chandra	Tidak ada	Tidak ada	PT Lestari Capital - Pemegang saham (51%)
2.	Antonius Padua Saptono Soerjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama, Bapak Alex Purnadi Chandra merupakan pemegang saham (51%) pada perusahaan PT Lestari Capital.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Alex Purnadi Chandra	Tidak ada	Tidak ada	Eric Suryadi Chandra - Adik kandung
2.	Antonius Padua Saptono Soerjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris utama Alex Purnadi Chandra merupakan kakak kandung dari pemegang saham Eric Suryadi Chandra				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp2.476.200.000	2	Rp1.140.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp890.400.000	2	Rp580.800.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp255.550.000	2	Rp130.900.000
Total			Rp3.622.150.000		Rp1.851.700.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	1 Unit Mobil Dinas (3)	1 Unit Mobil Dinas (2)
3.	Asuransi Kesehatan	1 Buah Asuransi Kesehatan (3)	1 Buah Asuransi Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai berdasarkan RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	21.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.66 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.79 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.31 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai telah sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13 Januari 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
2.	17 Februari 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
3.	10 Maret 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
4.	18 April 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
5.	16 Mei 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
6.	16 Juni 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
7.	21 Juli 2023	11	a. Akselerasi Kredit b. Financial Projection



8.	22 Agustus 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
9.	13 Oktober 2023	11	a. Disiplin Kredit b. Progress Rencana Kerja c. Issue strategis
10.	26 November 2023	11	Rencana Kerja Tahun 2024
11.	11 Desember 2023	11	Penyampaian RBB Tahun 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun dilaksanakan secara luring.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Alex Purnadi Chandra	11	0	100%
2.	Antonius Padua Saptono Soerjo	11	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Lestari Bali menghadiri rapat yang dilaksanakan pada tahun 2023.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Pada tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal di BPR Lestari Bali								

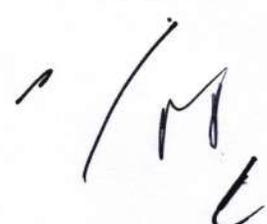


J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	5	4
Dalam Proses Penyelesaian	16	3
Total	21	7
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum yang dihadapi BPR Lestari Bali pada tahun 2023 terdiri atas 17 permasalahan perdata (8 di antaranya merupakan permasalahan perdata khusus) dan 7 permasalahan pidana.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama/ PSP	Pribadi Budiono	Direktur Utama (saat benturan kepentingan terjadi)	Proses Pembangunan Kantor Pusat Sunset Road	63.260 juta rupiah	Benturan kepentingan ini berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. BPR Lestari Bali dari tanggal 12 Oktober 2022-25 Oktober 2022.
2.	Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama/ PSP	Albertus Gunawan	Direktur Utama	Pembayaran Fee Pemasaran AYDA kepada Gaia Property	1.213 juta rupiah	Benturan kepentingan ini berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan



							n Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. BPR Lestari Bali pada bulan September 2023.
3.	Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	Albertus Gunawan	Direktur Utama	Pembayaran fee atas penggunaan teknologi penunjang analisis kredit	192 juta rupiah	BPR Lestari Bali bekerja sama dengan Theta Solusi Indonesia atas pengadaan teknologi IDP sebagai penunjang analisis kredit. Adapun total transaksi di atas adalah sampai dengan bulan November 2023.
4.	Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama/ PSP	Albertus Gunawan	Direktur Utama	Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Karyawan	786 juta rupiah	Kerja sama pelatihan dan pengembangan karyawan BPR Lestari Bali dengan Kampus Akubank
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p> <p>Transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh pihak-pihak sebagaimana disebut diatas telah ditindak lanjuti sesuai ketentuan internal dan otoritas yang berlaku.</p>							



L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Oktober 2023	Sosial	Generasi Lestari merupakan program beasiswa pendidikan kepada mahasiswa UNUD, ITB dan UNAIR	Mahasiswa UNUD, ITB, UNAIR	Rp882.400.165
2.	27 Desember 2023	Sosial	Anak Asuh Lestari merupakan program beasiswa pendidikan kepada anak-anak kurang mampu serta anak yatim	Anak-anak kurang mampu serta anak yatim	Rp54.564.000
3.	24 Desember 2023	Sosial	Lestari For Kids merupakan program pendistribusian beras kepada 37 panti asuhan binaan BPR Lestari Bali	37 panti asuhan binaan BPR Lestari Bali	Rp148.623.000
4.	23 Desember 2023	Sosial	Lestari Mebanjar merupakan program sebagai bentuk dukungan kepada lingkungan sekitar seperti banjar dan STT	Desa Adat, Banjar, dan STT	Rp86.282.750
5.	12 Desember 2023	Sosial	Lestari Peduli merupakan program dengan aksi cepat tanggap atas kondisi yang terjadi	Berkolaborasi dengan Pemerintah daerah	Rp2.540.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial BPR Lestari Bali dilaksanakan melalui beberapa program yakni Lestari Mebanjar (Sosial Budaya), Generasi Lestari (Pendidikan), Anak Asuh Lestari (Pendidikan), Lestari For Kids, serta Lestari Peduli yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR LESTARI BALI
Alamat	: JALAN TEUKU UMAR NO 110 DENPASAR
Nomor Telepon	: 0361246706
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp429.613.080.280
Total Aset	: Rp6.495.832.999.726

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR LESTARI BALI Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.93	0.386
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.04	0.255
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.00	0.050
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.27	0.227
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.65	0.165
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.95	0.049
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.17	0.217
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	1.90	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.146
Nilai Komposit			2.000
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.93)

BPR memiliki struktur yang memadai dengan SOP sesuai dengan ketentuan otoritas, serta rasio KPMM yang masih di atas ketentuan Tingkat Kesehatan Bank. Namun, BPR masih memiliki temuan berulang atas pemeriksaan OJK dan penurunan kinerja keuangan BPR yang masih menjadi prioritas perbaikan kedepannya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.04)

Jumlah Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan, namun telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Selain itu meeting telah dilaksanakan minimal sekali dalam 3 bulan dan hasil meeting dituangkan ke dalam risalah rapat dan tidak terdapat intervensi oleh Dewan Komisaris terhadap operasional BPR. Pemantauan anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi belum mencakup semua aspek, khususnya penerapan manajemen risiko sehingga tindak lanjut penyelesaian permasalahan BPR belum dilakukan secara signifikan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2)

BPR Lestari Bali telah memiliki komite-komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

BPR telah memiliki ketentuan tentang benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan PE tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi, keuntungan BPR. Namun demikian, masih belum ditetapkan langkah-langkah pencegahan risiko benturan kepentingan secara efektif.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.27)

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak rangkap jabatan dan BPR Lestari telah memiliki pedoman, sistem dan prosedur SKMR, SKK dan SKAI. Selain itu Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan tepat waktu kepada dewan komisaris dan OJK, namun masih ditemukan pelanggaran ketentuan yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan TKS BPR.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.65)

SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan OJK, namun masih ditemukan pelanggaran yang bersifat signifikan terhadap kinerja keuangan dan TKS BPR.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.95)

Laporan KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu dan hasil audit KAP sudah disampaikan ke OJK, serta penugasan KAP sudah sesuai dengan ketentuan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.17)

BPR Lestari Bali telah memiliki SKMR dan memiliki kebijakan manajemen risiko, serta menyampaikan laporan profil risiko secara rutin ke otoritas. Namun, penerapan manajemen risiko belum dilakukan dengan memadai khususnya terkait strategi manajemen risiko yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan TKS BPR.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah memiliki ketentuan tertulis terkait dengan BMPK serta tidak terdapat pelanggaran terkait BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

RBB BPR disusun sesuai cakupan yang ditentukan dalam ketentuan, namun masih terdapat pos-pos indikator kinerja dalam RBB tidak tercapai dan RBB BPR termasuk perubahannya disampaikan ke OJK namun terlambat karena kendala operasional.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.95)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang tergambar melalui penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Namun, masih terdapat penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui APPK yang melewati batas waktu

C. Kesimpulan Umum

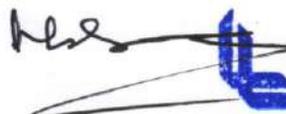
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Penerapan tata kelola di BPR masih perlu dilakukan perbaikan mengingat adanya indikasi intervensi PSP BPR terhadap operasional BPR yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan dan TKS BPR. Selain itu, penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko dinilai masih kurang memadai.

Denpasar, 24 Januari 2024

PT BPR LESTARI BALI

Disetujui oleh


BPRLESTARI
BALI

Alex Purnadi Chandra
Komisaris Utama



Albertus Gunawan
Direktur Utama